

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 380–399. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399>
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>
- Hartanti, H. (2015). Analisis Perhitungan PPh Badan Dalam Rangka Penyesuaian Undang-Undang Dan Peraturan Pajak Yang Berlaku. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1).
- Leliya, & Afyah, F. (2016). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *Jurnal AL-Mustashfa*, 4(2), 158–177.
- Manis, N. L. P., & Sukraaliawan, I. N. (2017). *Pelaksanaan NPWPD di Bidang Pajak Hotel dan Restoran untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng*. 8(1), 26–41.
- Nurrohman, B. (2020). E-Government Sebagai Upaya Inovasi Dalam Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP*, 5(2), 20–30.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Perubahannya, (2010).
- Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (2015).
- Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, (2016).

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, (2018).

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Ed. revisi). Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (2007).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).